

**ANALISIS PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KECAMATAN  
BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Untuk Mencapai Derajat Sarjana S-1**

**Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**Oleh**

**AYULIA**

**E12116011**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**

**LEMBARAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KECAMATAN BINUANG  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Dipersiapkan dan disusun oleh

**AYULIA  
E12116011**

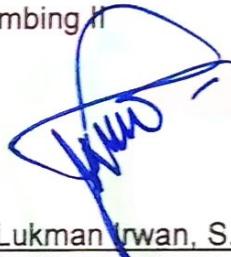
Menyetujui:

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si.  
NIP. 19570818 1986 03 1 002

Pembimbing II



Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si.  
NIP. 19790106 200501 1 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin



  
Dr. H. A. M. Rusli, M.Si.  
NIP. 19640727 1991 03 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : AYULIA

NIM : E12116011

Departemen : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima saksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 1 Desember 2020

Yang menyatakan,

A green and yellow postage stamp with the text "METERAI TEMPEL" at the top, a Garuda emblem, and the value "6000 ENAM RIBURUPIAH" at the bottom. A handwritten signature is written over the stamp.

AYULIA

## **KATA PENGANTAR**

**Bismillahirrahmanirahim.**

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT. Atas nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul "Analisis Pengembangan Pariwisata Di Kecamatan Kabupaten Polewali Mandar" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Dan tak lupa penulis kirimkan shalawat beserta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang syafaatnya kita nantikan di Yaumul Qiyamah nanti.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini bukanlah hal yang mudah, banyak kendala serta tantangan yang harus dihadapi yang membutuhkan waktu tidak singkat. Namun, semua itu penulis dapat menghadapinya berkat doa, kegigihan dan bimbingan dari berbagai pihak atas izin ALLAH SWT. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang tercinta ayahanda ABD. Kadir dan ibunda Bunga atas segala kasih sayang dan cintanya sehingga rhido ALLAH SWT terus tercurah pada penulis.

Skripsi ini tidak selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan oleh karena itu penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan pada program S1 di Universitas Hasanuddin;
2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh stafnya;
3. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si. selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beserta seluruh staf pegawai di lingkungan Departemen Ilmu Pemerintahan;
4. Bapak Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si. selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari awal proposal hingga skripsi ini selesai. Serta, sebagai Penasehat Akademik (PA) Penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin;
5. Bapak Dr. A. Lukman Irwan, S.IP.,M.Si. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari awal proposal hingga skripsi ini selesai;
6. Kepada para tim penguji yang telah banyak memberikan kritikan dan saran dalam upaya penyempurnaan skripsi ini yakni Ibu Dr. Hj. Nurlinah, M.Si. dan Bapak Dr. H. Suardiman Syamsuh, M.Si.;

7. Seluruh dosen Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si., Prof. Dr. Rasyid Thaha, M.Si., Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si., Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si., Dr. H. A. M. Rusli, M.Si., Dr. Suhardiman, S.Sos.,M.Si., Dr. A. Lukman Irwan, S.IP.,M.Si., Rahmatullah, S.IP.,M.Si., Ashar Prawitno, S.IP.,M.Si, Sunardi, S.IP, M.AP.:
8. Terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menyelesaikan skripsi ini, yakni Kepala Dinas Penuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar Bapak H. Januari, S.soso.,M.Si., Sekretaris Andi Sukmawati, Kepala Bidang Usaha Pariwisata Bapak Baso Asmad Matturungan, S.T.,M.AP., Dinas Pekerjaan Umum Kepada Bidang Cipta Karya Bapak Arsyat Afandi, Sekertaris Dinas Perhubungan Bapak Adam, Kepala Bidang pengembangan perhubungan Dinas Perhubungan Bapak H. Alimuddin, Camat Binuang Bapak Andi Idrus.SH, Kepala UPTD Bapak Asri, serta semua yang terlibat dalam pengumpulan data maupun informasi kepada penulis:
9. Terimakasih untuk Saudara dan saudari tercinta Ilmu Pemerintahan FISIP Unhas angkatan 2016 Veren16en, teruntuk UunG, Meri, Mita terimakasih untuk semua analisis dan observasi penduduk buminya, teruntuk seperjuangan kepengurusan Cica, Meri, Niaw, Hesti, Wanda, Uni, Romi, Dirvan, Wawan, Dede, Heril, Ari, Ferry, Yusrisal, Wahid, Agung. Barsan, terimakasih untuk pergulatan yang penuh cinta di Bumi Orange. Teruntuk Fira dan

Oma terimakasih telah menguji kesabaran. Terimakasih untuk semua cinta dan peluk dikala Hujan dibulan September. Sampai bertemu kembali di pelaminan, rantauan, tongkrongan atau ketidak sengajaan takdir Tuhan:

10. Terimakasih Untuk Saudari tak sedarah Hasmirah peluk hangat untukmu yang setia mendengar dan bertukar pikiran kerasnya kehidupan masa depan:

11. Terimakasih untuk Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAPEM) FISIP Unhas, banyak pelajaran dan pengalaman yang berharga, semangat dan kekeluargaan yang hangat. Jayalah Himapemku, Jayalah Himapem kita.

12. Teman-teman KKN Tematik Kecamatan Towuti Gel.102 Desa Tokalimbo, Retno, Inda, Nelar, Kadek dan Adil terimakasih telah menjadi satu bagian yang menyengkan.

Terima Kasih, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 20 November 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PENERIMAAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
INTISARI .....	xiv
ABSTRACT .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.2. RUMUSAN MASALAH .....	7
1.3. TUJUAN PENELITIAN .....	9
1.4. MANFAAT PENELITIAN .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	10
2.1. Peran Pemerintah .....	10
2.1.1 Pengertian Peran.....	10
2.1.2 Pemerintah Daerah .....	13
2.2. Pengembangan .....	16
2.2.1 pengertian Pengembangan.....	16
2.2.2 Pengembangan Destinasi pariwisata .....	17
2.2.3Peran Pemerintah daerah dalam Pengembangan Pariwisata....	21
2.3. Kepariwisataaan .....	22
2.3.1 Kegiatan Kpariwisataaan .....	22
2.3.2 Pengertian Pariwisata .....	25

2.3.3 Potensi Pariwisata .....	29
2.3.4 Jenis- jenis Pariwisata .....	29
2.4 Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar .....	35
2.5 PERDA No. 8 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar .....	36
2.6 Kerangka Konsep.....	38
BAB III METODE PENELITIAN .....	40
3.1. Tipe Penelitian .....	40
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	40
3.3. Informan Penelitian .....	41
3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	41
3.5. Jenis Data .....	42
3.6. Fokus Penelitian .....	43
3.7. Analisis Data .....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	45
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Polewali Mandar .....	45
4.2. Gambaran Umum Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar .....	49
4.2.1 Struktur Organisasi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar .....	49
4.2.2 Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar.....	50
4.3. Gambaran Umum Kecamatan Binnuang .....	59
4.3.1 Keadaan Geografis .....	59
4.3.2 Keadaan Pemerintahan .....	64

4.3.4 Keadaan Kependudukan .....	68
4.3.4 Keadaan Sosial .....	72
4.4. Hasil dan Pembahasan .....	76
4.4.1 Penataan dan pengembangan objek wisata di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.....	76
4.4.2 Membangun, mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan di Kecamatan Binuang kabupaten Polewali Mandar .....	86
4.4.3 Bagaimana promosi kepariwisataan di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar .....	100
BAB V PENUTUP .....	115
5.1. Kesimpulan .....	115
5.2. Saran .....	117
DAFTAR PUSTAKA .....	118
LAMPIRAN .....	123

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah kunjungan wisatawan Domestik dan Mancanegara di Kabupaten Polewali Mandar .....	3
Tabel 2.	Jumlah Kecamatan dan desa/Kelurahan di Kabupaten Polewali Mandar .....	48
Tabel 3	jumlah curah hujan dan hari menurut bulan di Kecamatan Binuang, 2018 .....	61
Tabel 4	letak dan status pemerintahan menurut desa/kelurahan di Kecamatan Binuang, 2018 .....	62
Tabel 5	luas wilayah, jarak dan ketinggian dari permukaan air laut menurut desa/kelurahan di Kecamatan Binuang .....	63
Tabel 6	jumlah lingkungan, Dusun, dan Rukun Tetangga di Kecamatan Binuang .....	65
Tabel 7	Jumlah Kelembagaan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Binuang .....	66
Tabel 8	Jumlah Pegawai Negeri menurut Instansi Pemerintahan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Binuang, 2018.....	67
Tabel 9	Jumlah Rumah Tangga, penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Binuang, 2018 .....	70
Tabel 10	Jumlah Penduduk menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Binuang, 2018 .....	71
Tabel 11	Jumlah Tempat Rekreasi Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Binuang .....	75
Tabel 12	Data Organisasi Pariwisata Kecamatan Binuang .....	77
Tabel 13	Rincian Data dan Lokasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus	

	Fisik Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2017 .....	88
Tabel 14	Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2018 .....	89
Tabel 15	Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Bidang Kepariwisataan Tahun Anggaran 2019 .....	90
Tabel 16	Rekapitulasi Data Jumlah Kunjungan bulan Januari S/D Desember 2017 Kecamatan Binuang .....	104
Tabel 17	Rekapitulasi Data Jumlah Kunjungan bulan Januari S/D Desember 2018 Kecamatan Binuang .....	105
Tabel 18	Rekapitulasi Data Jumlah Kunjungan bulan Januari S/D Desember 2019 Kecamatan Binuang .....	106
Tabel 19	Indikator dan Kesimpulan Hasil .....	109

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Kerangka Konsep ..... 38

## INTISARI

**Ayulia, E12116011. Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin menyusun skripsi dengan judul “Analisis Pengembangan Pariwisata di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar”. Dibawah bimbingan Oleh Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M. Si. sebagai pembimbing I dan Dr. A. Lukman Irwan, S.IP.,M.Si. sebagai pembimbing II**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata di kecamatan Binuang Kabupaten polewali Mandar dilihat dari penataan dan pengembangan objek wisata, pembangunandan pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata serta promosi kepariwisataan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan pemecahan masalah objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau data yang ada dilapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi serta dokumentasi yang meliputi arsip, kajian pustaka atau literatur yang terkait dengan permasalahan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan: pengembangan pariwisata di Kecamatan Binuang Kabupaten polewali Mandar dilihat dari penataan dan pengembangan objek wisatanya sudah sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah dengan mengidentifikasi objek wisata yang memiliki potensi untuk kemudian difokuskan pembangunanya. Selain itu, kegiatan pembinaan terhadap pengelola pariwisata juga dilakukan beberapa bulan sekali demi peningkatan mutu dan kualitas objek wisata. Kemudian, Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah juga dapat terlihat dari upaya pembangunan dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana pendukung pariwisata. Promosi pariwisata oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata yang dinilai cukup efektif yaitu *event* Polewali Mandar Festival Fork & Art (PIFAF) yang selain bertujuan untuk memperkenalkan budaya juga memperkenalkan potensi-potensi pariwisata di Kabupaten Polewali Mandar.

**Kata kunci: Pengembangan, Pariwisata, Kecamatan Binuang**

## **ABSTRACT**

**Ayulia, E12116011. Department of Government Science, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University compiled a thesis entitled "Analysis of Tourism Development in Binuang District, Polewali Mandar Regency". Under the guidance of Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M. Si. as supervisor I and Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si. as a supervisor II**

This study aims to determine the role of the government in tourism development in the Binuang sub-district, Polewali Mandar Regency, seen from the arrangement and development of tourist objects, the development and development of tourism supporting facilities and infrastructure and the promotion of tourism.

The method used in this research is to use a qualitative descriptive research type which aims to describe the problem solving of the research object based on visible facts or data in the field. Data collecting technique is done by interviewing and observing and documentation which includes archives, literature review or literature related to research problems.

The results showed: tourism development in Binuang Subdistrict, Polewali Mandar Regency, seen from the arrangement and development of tourist objects in accordance with the Regional Tourism Development Master Plan by identifying tourist objects that have the potential to focus on development. In addition, coaching activities for tourism managers are also carried out every few months in order to improve the quality and quality of tourism objects. Then, the development and development of tourism facilities and infrastructure carried out by the government can also be seen from the development and maintenance efforts of tourism supporting facilities and infrastructure. Tourism promotion by the Youth Sport and Tourism Agency which is considered quite effective is the Polewali Mandar Festival Fork & Art (PIFAF) which in addition to introducing culture also introduces tourism potentials in Polewali Mandar Regency.

**Keywords: Development, Tourism, Binuang District**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pariwisata telah menjadi sektor strategis dalam upaya pembangunan nasional, itulah mengapa penting bagi sebuah negara dalam merencanakan strategi pengembangan pariwisatanya. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki berbagai potensi sumber daya alam melimpah begitu pun keindahan alamnya yang khas di setiap daerah yang menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara yang apabila dikelola dengan benar dapat memberikan keuntungan besar bagi negara. Salah satunya dengan menjadikan daerah tersebut sebagai tempat sarana destinasi wisata. Daerah-daerah yang dianugrahi sumber daya alam yang eksotis diharapkan dapat memberikan kontribusi besar sebagai sumber pendapatan daerahnya. Apalagi dengan adanya otonomi daerah, suatu kabupaten/kota dituntut untuk dapat hidup mandiri. Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah ditinjau dari kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber- sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya (Halim,2001)<sup>1</sup>

Indonesia memiliki panjang garis pantai 108.000 km dengan jumlah pulau 17.503 yang potensial dalam pengembangan wisata bahari serta potensi wisata alam pegunungan dengan berbagai keunikannya masing-

---

<sup>1</sup>Halim,Abdul. 2001. Bunga Rampai:manajemen Keuangan Daerah. Edisi Pertama. Yogyakarta: UUP AMP YKPN

masing. Karenanya pengembangan pariwisata dianggap sebagai salah satu langkah yang tepat dalam meningkatkan kunjungan wisatawan di Indonesia. Pariwisata merupakan salah satu kegiatan kepariwisataan yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah sehingga membuka kesempatan kerja bagi masyarakat untuk ikut terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata. Pariwisata harusnya mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam rangka mencapai tujuan kesejahteraan yang diinginkan dengan cara pemberdayaan. Pariwisata merupakan sektor yang multidimensi. Sehingga, dalam upaya membangun dan mengembangkan kepariwisataan di suatu daerah, tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja tetapi kepada seluruh *stakeholders* yang ada.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa pemerintah daerah dapat mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri dan memanfaatkan segala sumber daya yang ada untuk pembangunan sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah serta kualitas hidup masyarakat.<sup>2</sup> Inilah yang kemudian mendorong pemerintah kabupaten Polewali Mandar meningkatkan pengembangan pariwisatanya melalui Peraturan Daerah no. 8 tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata kabupaten Polewali Mandar sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan pariwisata di Daerah yang dapat digunakan oleh semua komponen pariwisata daerah dalam menentukan perencanaan,

---

<sup>2</sup> UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

pelaksanaan dan pengendalian kepariwisataan di daerah.<sup>3</sup>Mengingat kabupaten Polewali Mandar, khususnya di kecamatan Binuang yang memiliki kekayaan alam yang potensial dalam pengembangan sektor pariwisata.

Kabupaten polewali Mandar memiliki berbagai potensi wisata dengan daya tariknya sendiri yang terbilang cukup banyak khususnya di kecamatan Binuang. Hal ini tentu dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah apabila dapat dikembangkan dengan baik. Namun, hingga kini potensi pariwisata yang ada belum seluruhnya dikembangkan dengan baik oleh pemerintah. Sehingga, akan berpengaruh pada jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Polewali Mandar seperti yang terlihat pada tabel 1 berikut ini.

**Tabel 1 Jumlah kunjungan wisatawan Domestik dan Mancanegara di kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017-2019**

Tahun	Domestik	Mancanegara
2017	451 499	188
2018	359 048	287
2019	500.653	150

*Sumber: BPS Kabupaten Polewali Mandar*

Berdasarkan tabel 1. diatas bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Polewali Mandar tidak mengalami peningkatan yang signifikan bahkan terjadi penurunan pada wisatawan domestik dan

<sup>3</sup> PERDA Kab. Polewali mandar No. 8 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten polewali Mandar

mancanegara. Sedangkan, salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam upaya pengembangan pariwisata dapat dilihat dari jumlah pengunjung ke daerah tersebut. Semakin indah dan menarik sebuah objek wisata maka semakin tinggi pula jumlah pengunjung yang berkunjung ke daerah sebut.

Kabupaten Polewali Mandar, tidak hanya meliputi garis pantai tetapi juga mencakup gugusan pulau-pulau kecil yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata bahari terkhusus di kecamatan Binuang. Untuk mencapai lokasi wisata dapat ditempuh menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat, dilanjutkan dengan menggunakan perahu nelayan setempat di pelabuhan Belang-belang. Suguhan panorama matahari terbit dan tenggelam menjadi nilai tambah yang dapat dinikmati. Di salah satu pulau tersebut yaitu pulau Gusung toraja telah disediakan, mushollah, gazebo, sebagai tempat beristirahat, juga ada beberapa warung kecil yang dikelola masyarakat setempat. Bagi yang ingin berenang atau melakukan kegiatan di air terdapat penyewaan perlengkapan berenang atau *snorkeling* seperti pelampung ataupun kacamata renang. Selain itu juga terdapat wisata alam yang tidak kalah indahnya seperti sungai dan air terjun juga wisata buatan yang dikelola oleh masyarakat setempat yang juga dapat ditempuh oleh kendaraan roda dua dan empat dengan akses jalan yang cukup baik.

Menurut UU RI No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sehingga pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting yang sangat menunjang pertumbuhan industri pariwisata. Sarana prasarana harus ada dalam suatu kawasan wisata untuk menciptakan kepuasan wisatawan. Sarana dan prasarana dapat menjadi salah satu penunjang agar daya tarik wisata di kawasan ini diminati oleh wisatawan. Karena apabila sarana dan prasarana tidak dikembangkan dengan baik berakibat berkurangnya minat wisatawan untuk berkunjung.<sup>4</sup>

Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan pariwisata mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan Indonesia sebagai penyumbang devisa negara. Hal ini terlihat dari performanya yang meningkat setiap tahun bila dibandingkan dengan komoditas lain, seperti minyak, gas, batu bara, dan kelapa sawit yang terus merosot. Selain itu, pariwisata juga dianggap punya keunggulan karena mayoritas kegiatannya berada di sektor jasa sehingga menciptakan lapangan

---

<sup>4</sup>UU RI No. 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisata

pekerjaan dan kesempatan berusaha. Pariwisata juga dianggap komoditas yang paling berkelanjutan dan menyentuh hingga ke level paling bawah masyarakat.<sup>5</sup>

Pengembangan wisata di suatu daerah membutuhkan adanya kontribusi dan kerjasama dari para pemangku kepentingan pariwisata khususnya di kecamatan Binuang. Peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata menjadi sangat penting mengingat di kecamatan Binuang memiliki potensi pariwisata yang baik namun belum ditunjang dengan fasilitas dan pengelolaan yang profesional serta kualitas sumber daya manusia (masyarakat lokal) masih kurang.

Pengembangan wisata bahari di kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar masih belum maksimal terlihat dari sarana dan prasana wisata yang masih belum memadai seperti kepemilikan transportasi masih bersifat perseorangan yang belum terorganisir dengan baik. Selain itu, kondisi toilet dan mushollah yang tak memiliki air bersih. Untuk mendapatkan air bersih harus mengeluarkan uang sekitar Rp. 5000 per jergen dan pasokan listrik/penerangan yang masih menggunakan genset khusus di pulau Gusung Toraja. Sedangkan di pulau lainnya seperti, pulau kucing dan pantai pasir putih Mirring masih belum terdapat fasilitas apapun. Begitu pun dengan objek wisata alam seperti sungai dan air terjun yang beberapa masih belum memiliki fasilitas prasana menunjang yang baik, juga area parkir yang tidak bisa menampung banyaknya

---

<sup>5</sup>CAHYU. 24 sep 2018. Industri pariwisata Indonesia kian meningkat pesat <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/3650849/industri-pariwisata-indonesia-kian-meningkat-pesat> akses. 26/10/2019

kendaraan utamanya pada saat hari libur dan harus parkir di pinggir jalan, juga jalan yang sempit.

Padahal dalam peraturan daerah No. 8 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar tercantum pada BAB IV tentang arah kebijakan pengembangan pariwisata “Membangun, mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan; Meningkatkan promosi kepariwisataan untuk mewujudkan daerah sebagai tujuan wisata;”<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka sangat diperlukan sebuah penelitian mengenai, **“Analisis Pengembangan Pariwisata Di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pariwisata mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan Indonesia sebagai penyumbang devisa negara, begitupun dalam memberikan kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Sehingga, dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa pemerintah daerah dapat mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri dan memanfaatkan segala sumber daya yang ada untuk pembangunan sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah serta kualitas hidup masyarakat. Inilah yang kemudian mendorong pemerintah kabupaten Polewali Mandar, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dalam meningkatkan pengembangan

---

<sup>6</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar (Pasal 11 Huruf b dan c)

pariwisatanya melalui Peraturan Daerah no. 8 tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata kabupaten Polewali Mandar sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan pariwisata di Daerah yang dapat digunakan oleh semua komponen pariwisata daerah dalam menentukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kepariwisataan di daerah. Mengingat kabupaten Polewali Mandar, khususnya di kecamatan Binuang yang memiliki kekayaan alam yang potensial dalam pengembangan sektor pariwisata.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penataan dan pengembangan objek wisata di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar?
2. Bagaimana membangun, mengembangkan sarana dan prasaranan pendukung kepariwisataan di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar ?
3. Bagaimana promosi kepariwisataan di kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah penulis diatas, maka tujuan penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Penataan dan pengembangan objek wisata di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar
2. Untuk mengetahui bagaimana membangun, mengembangkan sarana dan prasaranan pendukung kepariwisataan di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar
3. Untuk mengetahui bagaimana promosi kepariwisataan di kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Dari segi akademisi, penelitian ini akan mampu menambah perspektif civitas akademika Prodi Ilmu Pemerintahan, sebagai bahan kajian dalam proses pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah khususnya dalam pengembangan pariwisata.
2. Dari segi metodologis, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu acuan untuk memahami proses pengembangan pariwisata dan dikolaborasikan dengan penelitian ilmiah lainnya.
3. Dari segi prakris, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota dalam pengembangan pariwisata.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam membahas dan mengkaji masalah pada penelitian ini, penulis membutuhkan landasan konsep yang kokoh untuk mendukung penelitian ini. Landasan konsep tersebut digunakan sebagai alat analisis terhadap permasalahan yang diangkat.

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis akan menggunakan teori, konsep, pendapat, gagasan yang akan dijadikan titik tolak landasan berpikir dalam penelitian ini.

#### **2.1 Peran pemerintah**

##### **2.1.1 Pengertian Peran**

Peran berarti laku, bertindak. Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang bekedudukan di masyarakat. (E.St. Harahap, dkk, 2007: 854) sedangkan makna peran yang dijelaskan dalam Status, Kedudukan dan Peran dalam masyarakat, dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu pertama penjelasan histories. Menurut penjelasan histories, konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang actor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. Kedua, pengertian peran menurut ilmu sosial. Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika

menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut.<sup>7</sup>

Istilah “peran” kerap diucapkan banyak orang. Sering kita mendengar kata peran dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Kata “peran” dikaitkan dengan “apa yang dimainkan” oleh seorang aktor dalam suatu drama. Kamus bahasa Indonesia menyebutkan pengertian peran adalah:

- a. Peran adalah mainan yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama.
- b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan.
- c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.<sup>8</sup>

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.<sup>9</sup>

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan pada hakekatnya

---

<sup>7</sup>E. St. Harahap, dkk, 2007. Kamus besar bahasa Indonesia (Hal: 854)

<sup>8</sup> Kamus besar bahasa Indonesia

<sup>9</sup>Soekanto, Soerjono, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara. (Hal: 243)

tidakada perbedaan , baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup tiga hal, yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
3. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur ditimbulkan karena jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu muncullah apa yang dinamakan peran. Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang

melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankansuatu peranan.

Dari sudut pandang yang lain, peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atas sekelompok orang dalam suatu peristiwa (Poerwadarminta, 1995). Dari berbagai pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian peranan dalam hal ini peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya dalam pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan masyarakat. Dapat dijelaskan bahwa peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan.<sup>10</sup>

### **2.1.2 Pemerintah Daerah**

Pemerintah Daerah dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 2 adalah sebagai berikut:

“Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

---

<sup>10</sup> Poerdarminta. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia

Fungsi Pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Fungsi Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah :

- a. Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- c. Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan sumber daya lainnya.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah sangat erat kaitannya dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu negara, yakni Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas pembantuan. Hal tersebut dijelaskan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah pasal 8, 9 dan 11 sebagai berikut :

1. Desentralisasi adalah Penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi berdasarkan Asas Otonomi.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagaimana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada Instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/wali Kotasebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
3. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah Otonomi untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.<sup>11</sup>

Sedangkan menurut Widarta (2005,h.38-39) menyatakan bahwa pemerintah daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah yaitu Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antara hubungan antara susunan

---

<sup>11</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

pemerintah dan antarpemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.<sup>12</sup>

## **2.2 Pengembangan**

### **2.2.1 Pengertian Pengembangan**

J.S Badudu dalam kamus umum bahasa Indonesia (2007:538) memberikan arti pengembangan sebagai proses, cara, pembuatan pengembangan.<sup>13</sup> Ditambahkan oleh Poerdarmita (2002:474) yang menyatakan bahwa pengembangan adalah suatu proses atau cara menjadikan sesuatu mejadi maju, baik, sempurna dan berguna.<sup>14</sup>

Dalam pengembangan sektor pariwisata, Gamal Suwantoro (1997) mengklafikasikan mengenai pola kebijakan pengembangan pariwisata yang meliputi:

1. Kebijakan umum
2. Arah pola kebijaksanaan pengembangan jalur wisatawan
3. Pola kebijakan pengembangan objek wisata
4. Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana
5. Kebijakan pengembangan kelembagaan
6. Kebijakan pengembangan industry<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> I, Widarta.2005.*Pokok-pokok pemerintah Daerah*. Bantul: Pondok Edukasi. (Hal: 38-39)

<sup>13</sup> Badudu, J.S, *Kamus bahasa indonesia*. (Hal: 538)

<sup>14</sup>Poerdarminta. 2002. *Kamus Umum Bahasa Indonsia*. Jakarta: Balai Pustaka.(Hal: 474)

<sup>15</sup>Suwantoro, Gamal, 1997. *Dasra-dasar pariwisata*. ANDY. Yogyakarta.

## 2.2.2 Pengembangan Destinasi Pariwisata

Menurut UU nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang spesifik berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat kegiatan kepariwisataan dan dilengkapi dengan ketersediaan daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait<sup>16</sup>. Menurut Pitana (2005:56) pengembangan pariwisata adalah kegiatan untuk memajukan suatu tempat atau daerah yang dianggap perlu ditata sedemikian rupa baik dengan cara memelihara yang sudah berkembang atau menciptakan yang baru. Sehingga pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata yang berkaitan secara langsung akan kelangsungan pengembangan pariwisata.<sup>17</sup>

Menurut Cooper dkk dalam Sunaryo (2013:159) menjelaskan bahwa kerangka pengembangan destinasi pariwisata terdiri dari komponen-komponen utama sebagai berikut:

1. Obyek daya tarik wisata (*Attraction*) yang mencakup keunikan dan daya tarik berbasis alam, budaya, maupun buatan/*artificial*.

---

<sup>16</sup>UU No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan

<sup>17</sup> Pitana, I Gede dan Putu G. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. CV Andi offset. Yogyakarta.

2. Aksesibilitas (*Accessibility*) yang mencakup kemudahan sarana dan sistem transportasi.
3. Amenitas (*Amenities*) yang mencakup fasilitas penunjang dan pendukung wisata.
4. Fasilitas umum (*Ancillary Service*) yang mendukung kegiatan pariwisata.
5. Kelembagaan (*Institutions*) yang memiliki kewenangan, tanggung jawab dan peran dalam mendukung terlaksananya kegiatan pariwisata.<sup>18</sup>

**a. Attraction**

Menurut Suwena (2010: 88), atraksi atau obyek daya tarik wisata (ODTW) merupakan komponen yang signifikan dalam menarik kedatangan wisatawan. Hal yang dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata disebut dengan modal atau sumber kepariwisataan (*tourism resources*). Modal atraksi yang menarik kedatangan wisatawan ada tiga, yaitu 1) *Natural Resources* (alami) seperti gunung, danau, pantai dan bukit; 2) atraksi wisata budaya seperti arsitektur rumah tradisional di desa, situs arkeologi, seni dan kerajinan, ritual, festival, kehidupan masyarakat sehari-hari, keramahtamahan, makanan; dan 3) atraksi buatan seperti acara olahraga, berbelanja, pameran, konferensi dan lain-lain.

---

<sup>18</sup>Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media. (Hal:159)

Modal kepariwisataan menurut Suwena (2010:89) dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata di tempat modal wisata ditemukan (*in situ*) dan di luar tempatnya yang asli (*ex situ*). Atraksi wisata dibedakan lagi menjadi atraksi penahan dan atraksi penangkap wisatawan.<sup>19</sup>

### **b. Accessibility**

Menurut Sunaryo (2013: 173), aksesibilitas pariwisata dimaksudkan sebagai “segenap sarana yang memberikan kemudahan kepada wisatawan untuk mencapai suatu destinasi maupun tujuan wisata terkait”. Menurut French dalam Sunaryo (2013: 173) menyebutkan faktor-faktor yang penting dan terkait dengan aspek aksesibilitas wisata meliputi petunjuk arah, bandara, terminal, waktu yang dibutuhkan, biaya perjalanan, frekuensi transportasi menuju lokasi wisata dan perangkat lainnya.

### **c. Amenities**

Sugiama (2011) menjelaskan bahwa amenities meliputi “serangkaian fasilitas untuk memenuhi kebutuhan akomodasi (tempat penginapan), penyediaan makanan dan minuman, tempat hiburan (*entertainment*), tempat-tempat perbelanjaan (*retailing*) dan layanan lainnya”.<sup>20</sup> French dalam Sunaryo (2013: 173) memberikan batasan bahwa amenities

---

<sup>19</sup>Suwena, I Ketut & Widyatmaja, I Gst Ngr. 2010. *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*. Bali : Udayana University Press. (Hal:88)

<sup>20</sup>Sugiama, A Gima. 2011. *Ecotourism :Pengembangan Pariwisata berbasis konservasi alam*. Bandung : Guardaya Intimarta. (Hal: 173)

bukan merupakan daya tarik bagi wisatawan, namun dengan kurangnya amenities akan menjadikan wisatawan menghindari destinasi tertentu.

#### **d. Ancillary Service**

Sunaryo (2013: 159) menjelaskan *ancillary service* lebih kepada ketersediaan sarana dan fasilitas umum yang digunakan oleh wisatawan yang juga mendukung terselenggaranya kegiatan wisata seperti bank, ATM, telekomunikasi, rumah sakit dan sebagainya. Sedangkan Sugiama (2011) menjelaskan bahwa *ancillary service* mencakup keberadaan berbagai organisasi untuk memfasilitasi dan mendorong pengembangan serta pemasaran kepariwisataan destinasi bersangkutan.<sup>21</sup>

#### Kelembagaan Pariwisata

Kelembagaan kepariwisataan dijelaskan dalam UU tentang Kepariwisata nomor 10 tahun 2009 sebagai “keseluruhan institusi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, swasta dan masyarakat, sumberdaya manusia, mekanisme operasional serta regulasi yang terkait dengan kepariwisataan”

---

<sup>21</sup>Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media. (Hal:159)

### 2.2.3 Peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata

Pemerintah merupakan salah satu *stakeholder* di dalam pengelolaah bidang pariwisata. Pemerintah juga memiliki fungsi sebagai pembuat berbagai kebijakan tentang pariwisata pada suatu daerah serta berperan dalam meningkatkan devisa dan pendapatan asli daerah melalui bidang pariwisata. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar yang menaungi bidang kepariwisataan diharapkan memiliki peran dalam menyediakan pariwisata di daerahnya dengan cara mengembangkan daya tarik serta saran kepariwisataan lainnya. Hal tersebut akan mampu terwujud jika pemerintah selaku pemegang kepentingan mampu mengembangkan pariwisata secara optimal.

Menurut Subadra (2006) pemerintah memiliki beberapa peran dalam bidang pariwisata yaitu:

1. Perencanaan pariwisata
2. Pembangaunan pariwisata
3. Kebijakan pariwisata
4. Peraturan pariwisata<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Subadra, I Nengah. 2006. *Ekowisata Hutan Mangrove dalam Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan: Studi Kasus Di Mangrove Information Center, Desa Pamogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar*. S2 Kajian Kepariwsataan. Bali: universitas udayana.

## 2.3 Kepariwisataan

### 2.3.1 Dalam kepariwisataan

Menurut Leiper dalam Ismayati (2009), terdapat tiga elemen utama yang menjadikan kegiatan kepariwisataan tersebut bisa terjadi yakni:

#### 1. Wisatawan

Adalah aktor dalam kegiatan wisata. Berwisata menjadi sebuah pengalaman manusia untuk menikmati, mengantisipasi dan mengingatkan masa-masa di dalam kehidupan.

#### 2. Elemen Geografi

Pergerakan wisatawan berlangsung pada tuga area geografi, seperti berikut ini :

- a) Daerah Asal Wisatawan (DAW), daerah tempat asal wisatawan berada ketika ia melakukan aktivitas keseharian, seperti bekerja, belajar, tidur dan kebutuhan dasar lain. Rutinitas itu sebagai pendorong untuk memotivasi seseorang berwisata. Dari DAW, seseorang dapat mencari informasi tentang obyek dan daya tarik wisata yang diminati, membuat pemesanan dan berangkat menuju daerah tujuan.

- b) Daerah Transit (DT), tidak seluruh wisatawan harus berhenti di daerah itu. Namun, seluruh wisatawan pasti akan melalui daerah tersebut sehingga peranan DT pun penting. Seringkali terjadi, perjalanan wisata berakhir di daerah transit, bukan di daerah tujuan. Hal inilah yang membuat negara-negara seperti Singapura dan Hongkong berupaya menjadikan daerahnya multifungsi, yakni sebagai Daerah Transit dan Daerah Tujuan Wisata.
- c) Daerah Tujuan Wisata (DWT), daerah ini sering dikatakan sebagai sharp end (ujung tombak) pariwisata. Di DWT ini dampak pariwisata sangat dirasakan sehingga dibutuhkan perencanaan dan strategi manajemen yang tepat. Untuk menarik wisatawan, DWT merupakan pemacu keseluruhan sistem pariwisata dan menciptakan permintaan untuk perjalanan dari DAW. DWT juga merupakan *raison d'être* atau alasan utama perkembangan pariwisata yang menawarkan hal-hal yang berbeda dengan rutinitas wisatawan.

### 3. Industri Pariwisata

Elemen ketiga dalam kepariwisataan adalah industri pariwisata. Industri yang menyediakan jasa, daya tarik, dan sarana wisata. Industri yang merupakan unit-unit usaha atau bisnis di dalam kepariwisataan dan tersebar di ketiga area geografi tersebut. Sebagai contoh, biro perjalanan wisata bisa ditemukan di daerah asal wisatawan. Penerbangan bisa ditemukan baik di daerah asal wisatawan maupun di daerah transit, dan akomodasi bisa ditemukan di daerah tujuan wisata.<sup>23</sup>

Asas, fungsi, tujuan kepariwisataan menurut Undang-Undang 10 Tahun 2009 sebagai berikut:

- a. Asas manfaat, asas kekeluargaan, asas adil dan merata, asas keseimbangan, asas kemandirian, asas kelestarian, asas partisipatif, asas berkelanjutan, asas demokratis, asas kesetaraan, asas kesatuan.
- b. Fungsi kepariwisataan adalah memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

---

<sup>23</sup> Ismayanti.2009. Pengantar Pariwisata. Jakarta: Grasindo

c. Tujuan kepariwisataan meliputi:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- 2) Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- 3) Menghapus kemiskinan
- 4) Mengatasi pengangguran
- 5) Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya
- 6) Memajukan kebudayaan
- 7) Mengangkat citra bangsa
- 8) Memupuk rasa cinta tanah air
- 9) Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa
- 10) Mempererat persahabatan antar bangsa

### **2.3.2 Pengertian Pariwisata**

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang terdiri atas tujuh belas bab dan tujuh puluh pasal yang mengandung ketentuan meliputi delapan hal, yaitu:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
4. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
5. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
6. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

7. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
8. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.<sup>24</sup>

Pengertian Pariwisata Pengertian pariwisata menurut A.J Burkat dalam Damanik (2006), pariwisata adalah perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan diluar tempat dimana mereka biasa hidup dan bekerja dan juga kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di suatu tempat tujuan.<sup>25</sup>

Menurut mathieson & Wall dalam Pitana dan Gayatri (2005), bahwa pariwisata adalah kegiatan perpindahan orang untuk sementara waktu ke destinasi diluar tempat tinggal dan tempat bekerjanya dan melaksanakan kegiatan selama di destinasi dan juga penyiapan-penyiapan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan mereka.<sup>26</sup>

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Yoeti, (1991:103). Pariwisata berasal dari dua kata yaitu Pari dan Wisata. Pari dapat diartikan sebagai banyak, berkali-kali, berputar-putar atau lengkap. Sedangkan Wisata dapat diartikan sebagai

---

<sup>24</sup>Undang-Undang Republik Indonesia, 2009. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang kepariwisataan. Jakarta

<sup>25</sup> Damanik, Janianton dan Weber, Helmut. (2006). *Perencanaan Ekowisata Dari Teori ke Aplikasi*. Yogyakarta: PUSPAR UGM dan Andi.

<sup>26</sup> Pitana, I Gede dan Putu Gede Gayatry. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta. Andi.

perjalanan atau bepergian yang dalam hal ini sinonim dengan kata “reavel” dalam bahasa Inggris.<sup>27</sup>

Definisi pariwisata memang tidak pernah persis diantara para ahli. Pada dasarnya pariwisata merupakan perjalanan dengan tujuan untuk menghibur yang dilakukan diluar kegiatan sehari-hari yang dilakukan guna untuk memberikan keuntungan yang bersifat permanen ataupun sementara. Tetapi apabila dilihat dari segi konteks pariwisata bertujuan untuk menghibur dan juga mendidik.

Berdasarkan definisa pariwisata diatas maka disimpulkan bahwa kegiatan pariwisata mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Terdapat dua lokasi yang saling terkait yaitu daerah asal dan juga daerah tujuan (destinasi).
2. Sebagai daerah tujuan pasti memiliki objek dan juga daya tarik wisata.
3. Sebagai daerah tujuan pasti memiliki sarana dan prasarana pariwisata.
4. Pelaksana perjalananan ke daerah tujuan dilakukan dalam waktu sementara.
5. Terdapat dampak yang ditimbulkan,khususnya daerah tujuan segi sosiala budaya,ekonomi dan lingkungan.

---

<sup>27</sup> Yoeti, Oka A. 1991. *Pengantar ilmu Pariwisata*. Bandung: ANGKASA. (Hal:103)

### 2.3.3 Potensi Pariwisata

Pengertian pariwisata menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Mariotti dalam Yoeti (1996: 172) mengatakan: Potensi Pariwisata merupakan sesuatu yang dimiliki oleh suatu wisata yang menjadi daya tarik bagi para wisatawan dan dimiliki oleh setiap tempat wisata. Potensi wisata adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tujuan wisata dan merupakan daya tarik agar orang-orang mau berkunjung ke tempat tersebut.<sup>28</sup>

### 2.3.4 Jenis-jenis Pariwisata

Berbicara tentang kepariwisataan tidak lepas dari jenis-jenis pariwisata dan macam-macam objek wisata. Adapun jenis-jenis pariwisata menurut Nyoman S. Pendit (2003) dalam buku Ilmu pengetahuan pariwisata sebuah pengantar perdana adalah:

a. Wisata Budaya

Seorang yang melakukan perjalanan wisata atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan atau

---

<sup>28</sup> Yoeti, Oka A. 1996. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa.

peninjauan ke tempat lain atau ke luar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka, budaya dan seni mereka. Sering perjalanan serupa ini disatukan dengan kesempatan-kesempatan mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan budaya.

b. Wisata kesehatan

Hal ini dimaksudkan dengan perjalanan seorang wisatawan dengan tujuan untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat tinggalnya sehingga bisa mengobati kelelahan-kelelahan jasmani dan rohani dengan mengunjungi tempat peristirahatan seperti mandi di sumber air panas atau tempat menyediakan fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya.

c. Wisata Olahraga

Ini dimaksudkan dengan wisatawan-wisatawan yang melakukan perjalanan dengan tujuan berolahraga atau memang sengaja bermaksud mengambil bagian aktif dalam pesta olahraga disuatu tempat atau negara, seperti Asian Games, Olimpiade, Thomas Cup, Uber Cup, dan lain-lain.

d. Wisata Komersial

Dalam jenis ini termasuk perjalanan untuk mengunjungi pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat

komersil seperti pameran industri, pameran dagang, dan sebagainya. Tidak jarang pameran atau pekan raya ini dimeriahkan dengan berbagai macam atraksi dan pertunjukkan kesenian.

e. Wisata Industri

Wisata industri adalah perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar atau mahasiswa atau orang-orang kesuatu kompleks satu daerah perindustrian dimana pabrik-pabrik atau bengkel-bengkel besar, dengan tujuan dan maksud untuk mengadakan peninjauan atau penelitian.

f. Wisata Konvensi

Berbagai negara dewasa ini membangun wisata konvensi dengan menyediakan fasilitas bangunan dengan ruangan-ruangan tempat bersidang bagi para peserta suatu konferensi, musyawarah, konvensi atau pertemuan lainnya.

g. Wisata Politik

Wisata politik adalah perjalanan yang dilakukan untuk mengunjungi atau mengambil bagian aktif dalam pariwisata kegiatan politik, misalnya ulang tahun perayaan 17 Agustus di Jakarta, penobatan ratu Inggris di London, dan sebagainya.

h. Wisata Sosial

Wisata sosial adalah pengorganisasian suatu perjalanan murah serta mudah untuk memberi kesempatan pada golongan masyarakat ekonomi lemah untuk mengadakan perjalanan misalnya buruh, petani atau mahasiswa.

i. Wisata Pertanian

Wisata pertanian adalah pengorganisasian perjalanan yang dilakukan ke proyek-proyek pertanian, perkebunan, dan sebagainya dimana wisatawan rombongan dapat mengadakan kunjungan dan peninjauan untuk studi atau sekedar melihat-lihat sekelilingnya sambil menikmati segarnya tanaman beraneka ragam dan suburnya pembibitan berbagai jenis sayu-mayur dan palawija disekitar perkebunan yang dikunjungi.

j. Wisata Maritim atau Bahari

Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan kegiatan olahraga air, seperti di danau, pantai atau memancing, berlayar, menyelam sambil melakukan pemotretan, kompetisi berselancar, balapan mendayung, berkeliling melihat taman laut dengan pemandangan yang indah dari permukaan air, serta berbagai rekreasi perairan.

k. Wisata Cagar Alam

Jenis wisata ini banyak diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan wisata dengan jalan mengatur wisata ke tempat cagar alam atau hutan lindung.

l. Wisata Buruh

Jenis wisata ini banyak dilakukan di negara yang memiliki daerah atau tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah yang digalakan oleh agen atau biro perjalanan. Wisata buruh ini diatur dengan bentuk safari buruh ke daerah atau hutan.

m. Wisata Pilgrim

Jenis wisata ini sedikit banyak dikaitkan dengan agama, sejarah, adat istiadat dan kepercayaan umat atau kelompok dalam masyarakat yang dilakukan baik dalam perorangan maupun rombongan yang bekunjung ke tempat suci, ke makam-makam orang besar atau pemimpin yang diagungkan, ke bukit atau gunung yang dianggap keramat, tempat pemakaman tokoh atau pemimpin sebagai manusia ajaib penuh legenda. Wisata pilgrim ini banyak dihubungkan dengan niat atau hasrat sang wisatawan untuk memperoleh restu, kekuatan batin, keteguhan iman dan tidak jarang pula untuk tujuan memperoleh berkah dan kekayaan

melimpah. Di tanah air kita banyak tempat suci dan keramat yang dikunjungi oleh umat-umat beragama tertentu, misalnya seperti Candi Borobudur, Prambanan, Pura Besaki di Bali, Sendang Sono di Jawa tengah, makam Wali Songo, dan sebagainya.

n. Wisata Bulan Madu

Wisata bulan madu adalah perjalanan yang dilakukan oleh pasangan pengantin baru yang diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan dengan fasilitas yang istimewa atau khusus yang sedang berbulan madu dengan fasilitas khusus dan tersendiri demi kenikmatan perjalanan dan kunjungan mereka, seperti kamar pengantin di hotel yang khusus disediakan dengan peralatan yang serba istimewa.

o. Wisata Petualangan

Wisata petualangan adalah jenis wisata yang melakukan kegiatan wisata seperti masuk hutan belantara yang tadinya belum pernah dijelajah, mendaki tebing yang terjal, terjun ke dalam sungai yang curam, arung jeram menyusuri goa dan susur pantai.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> S. Pendit Nyoman. 2003. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

## **2.4 Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar**

Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Susunan Organisasi Dinas Pemuda Dan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar pada bagian kelima, seksi sarana dan prasarana pariwisata pasal 15 yaitu:

- (1) Seksi sarana dan prasarana pariwisata mempunyai tugas mengendalikan peningkatan sarana dan prasarana pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi sarana dan prasarana pariwisata menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan petunjuk teknis peningkatan sarana dan prasarana pariwisata;
  - b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional peningkatan sarana dan prasarana pariwisata;
  - c. Pengendalian pelaksanaan pengembangan kawasan strategis pariwisata;
  - d. Pengendalian pelaksanaan pengembangan destinasi wisata;
  - e. Pengendalian peningkatan sarana dan prasarana pariwisata;
  - f. Pengendalian kemitraan dan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka

peningkatan sarana prasarana yang menunjang daya saing pariwisata;

- g. Pengendalian koordinasi teknis peningkatan sarana dan prasarana pariwisata;
- h. Pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan peningkatan sarana dan prasarana pariwisata; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atas terkait dengan tugas dan fungsinya.<sup>30</sup>

## **2.5 PERDA No. 8 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar**

Sesuai dengan Rencana Strategis Pembangunan Daerah, pembangunan pariwisata merupakan sektor andalan yang harus dikembangkan karena mampu mempengaruhi sektor-sektor pembangunan lainnya.

Pembangunan pariwisata mencakup 2 (dua) dimensi yaitu dimensi ekonomi dan sosial budaya. Dimensi ekonomi merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing dan sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Sejalan dengan perkembangan kondisi negara secara nasional yang disebabkan oleh situasi politik dan keamanan dalam negeri, maka pembangunan pariwisata harus mampu memulihkan citra pariwisata bagi daerah maupun nasional sebagai daerah tujuan wisata yang aman dan nyaman untuk dikunjungi. Di samping itu

---

<sup>30</sup>Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Susunan Organisasi Dinas Penuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar.(Pasal 5 Aya 1 dan 2)

RIPPDA ini disusun dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan pariwisata daerah melalui pengembangan ODTW.

Selanjutnya dari aspek sosial budaya RIPPDA ini merupakan upaya pendekatan yang utuh dalam melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat di daerah, melestarikan alam, melestarikan lingkungan serta menumbuhkan rasa kebanggaan nasional.

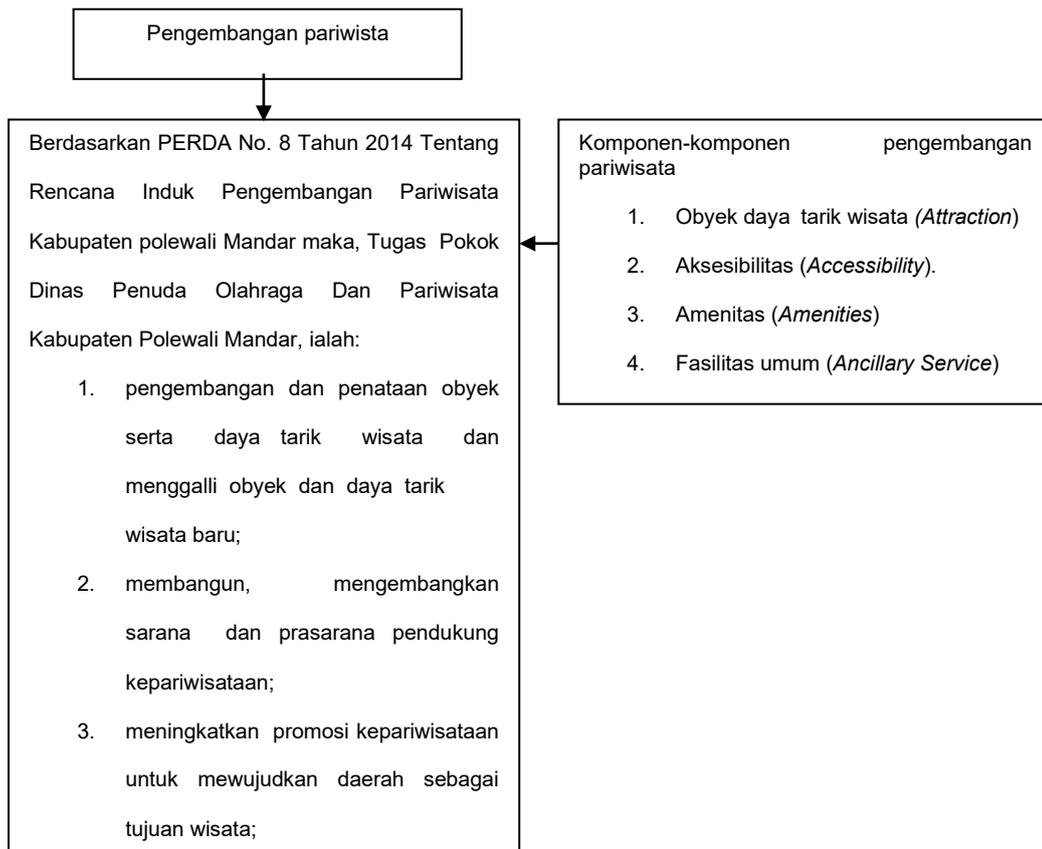
Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah sebagai pedoman bagi pelaksanaan pembangunan pariwisata di Daerah yang dapat digunakan oleh semua komponen pariwisata daerah dalam menentukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kepariwisataan di daerah, sebagai berikut:

- a. Memberikan gambaran secara komprehensif mengenai pengembangan potensi pariwisata daerah yang meliputi obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana wisata dan usaha jasa pariwisata;
- b. Memberikan pedoman tentang perencanaan yang dibutuhkan dalam pembangunan kepariwisataan di daerah yang mengakomodasikan isu-isu strategis dan perkembangan aktual secara terintegrasi dan sinergis sehingga pariwisata dijadikan alat dalam mencapai kesejahteraan secara berkelanjutan;
- c. Menyikapi peluang pembangunan kepariwisataan di daerah sejalan dengan perkembangan Pemerintah Daerah; dan

- d. Memberikan arah kebijakan dalam membangun kepariwisataan yang didasari oleh kebijaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

## 2.6 Kerangka Konsep

Gambar. 1 Skema Kerangka Konsep



Pengembangan pariwisata diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha, meningkatkan pertumbuhan ekomonmi, kesejahteraan rakyat dan mengatasi pengangguran serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Sejalan dengan hal tersebut dan melihat potensi pariwisata yang ada, pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Membentuk Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Kepariwisataandengan

tujuan untuk memberikan gambaran secara komprehensif mengenai pengembangan potensi pariwisata daerah, memberikan pedoman tentang perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kepariwisataan di daerah yang dibutuhkan dalam pembangunan kepariwisataan, menyikapi setiap peluang kepariwisataan dan memberikan arahan kebijakan dalam pembangunan kepariwisataan. Menurut Cooper dkk dalam Sunaryo (2013:159) menjelaskan bahwa kerangka pengembangan destinasi pariwisata terdiri dari komponen-komponen utama sebagai berikut:

- 1) Obyek daya tarik wisata (*Attraction*) yang mencakup keunikan dan daya tarik berbasis alam, budaya, maupun buatan/*artificial*.
- 2) Aksesibilitas (*Accessibility*) yang mencakup kemudahan sarana dan sistem transportasi.
- 3) Amenitas (*Amenities*) yang mencakup fasilitas penunjang dan pendukung wisata.
- 4) Fasilitas umum (*Ancillary Service*) yang mendukung kegiatan pariwisata.